

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Didalam kerangka pembangunan Nasional, pembangunan daerah merupakan bagian integral dalam arti sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Mengingat peran dan kedudukannya pembangunan daerah harus dilaksanakan secara serasi, selaras dan seimbang serta diarahkan agar dapat berlangsung secara berdaya dan berhasil guna pada seluruh tingkat administrasi pemerintah (RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2000–2010).

Pembangunan dalam lingkup spasial tidak selalu berlangsung secara merata. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat sementara daerah yang lain sebaliknya. Perbedaan akselerasi pertumbuhan antar daerah ini diantaranya disebabkan oleh perbedaan dalam ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang yang lain.

Rondinelli (1983), mengungkapkan bahwa pembangunan suatu perkotaan tidak bisa terlepas dari suatu perencanaan, karena perencanaan itu merupakan dasar dari pembangunan. Tanpa perencanaan pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik dan hasilnya tidak memuaskan seperti yang diharapkan atau tidak mencapai tujuan pemerintah. Perencanaan tata ruang dapat memecahkan pembangunan wilayah dalam hal ini perbedaan didalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta adanya perbedaan tingkat pendapatan dan kemakmuran.

Demikian pula dengan pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonomi sebagai salah satu faktor dalam pembangunan, dimana dengan adanya kelengkapan fasilitas pelayanan maka suatu daerah dapat dikatakan berkembang sehingga dalam hal ini fasilitas pelayanan sosial ekonomi merupakan fasilitas yang menjadi kebutuhan penduduk pada suatu wilayah dan dapat mendukung perkembangan wilayah dan dapat mendukung perkembangan wilayah.

Propinsi Jawa Timur sebagai bagian dari kesatuan wilayah Indonesia mengambil kebijakan pembangan sebagai turunan kebijakan tingkat pusat.

Kebijakan mengenai fasilitas pembangunan nasional diterjemahkan pada skala regional. Pembangunan daerah bawahan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan regional diarahkan pada peningkatan laju pembangunan daerah, meningkatkan aktivitas masyarakat guna terciptanya otonomi daerah yang bertanggung jawab serta mendorong pembangunan diseluruh wilayah.

Berdasarkan sistem pembangunan, kegiatan pembangunan di Jawa Timur yang bersumber pada pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia telah disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW) Jawa Timur. Didalam RTRW tersebut wilayah Propinsi Jawa Timur dibagi menjadi sembilan Wilayah Pembangunan (WP). Wilayah Nganjuk termasuk WP VII dengan pusat pengembangan di kota Kediri. Pusat wilayah pembangunan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kebijakan keruangan sehingga mampu memberikan jangkauan fasilitas pelayanan bagi penduduk, untuk meningkatkan perekonomian juga dikaitkan dengan upaya mengurangi arus mobilitas penduduk di kota-kota besar.

Adapun kebijakan yang ditempuh Kabupaten Nganjuk berkaitan dengan pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonominya membagi kawasan seluas 122.433,00 Ha menjadi VI Sub Wilayah Pembangunan. Hal ini didasarkan pada potensi wilayah dan kedudukan pada struktur ekonomi wilayah yang berkembang sekarang dan diperhitungkan akan memberi dorongan untuk mempercepat pertumbuhan dimasa yang akan datang. Masing-masing sub wilayah pembangunan tersebut adalah SWP I, terdiri dari kecamatan Nganjuk, Sukomoro, Pace, Wilangan, Bagor, Loceret dan berpusat di Kecamatan Nganjuk, SWP II meliputi Kecamatan Kertosono, Baron dengan pusat di Kecamatan Kertosono, SWP III terdiri dari Kecamatan Tanjunganom, Ngronggot, Prambon dengan pusat di Kecamatan Tanjunganom, SWP IV terdiri dari Kecamatan Berbek, Sawahan, Ngetos, dengan pusat di Kecamatan Berbek, SWP V terdiri dari Kecamatan Rejoso, Gondang, Ngluyu dengan di pusat di Kecamatan Rejoso dan SWP VI meliputi Kecamatan Lengkong, Patianrowo, Jaticalen dengan pusat di Kecamatan Lengkong.

Sedangkan ditinjau dari segi demografinya, jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Nganjuk terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya khususnya pada lima tahun terakhir meningkat dari 1.016.272 jiwa pada tahun 2001, menjadi 1.036.598 jiwa pada tahun 2005 yang berarti pertumbuhan rata-rata penduduk dikabupaten Nganjuk di setiap tahunnya sebesar 0,45%. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk tersebut maka kebutuhan akan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduknya juga mengalami peningkatan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk tersebut maka kebutuhan akan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduknya juga mengalami peningkatan. Permasalahan di daerah penelitian adalah adanya kesenjangan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi antara pusat dengan daerah pendukung dalam satu SWP dan kesenjangan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi antara SWP satu dengan SWP yang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis sangat tertarik mengadakan penelitian dengan tema “KAJIAN KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN SOSIAL EKONOMI PENDUDUK DAN HIRARKHINYA DI KABUPATEN NGANJUK”.

Tabel 1.1. Wilayah Pembangunan, Luas, Jumlah dan Distribusi Penduduk Tahun 2005

No	Unit Kawasan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
			2004	2005	
1	SWP I	Ngajuk *	22,59	64,798	0,24
		Sukomoro	35,39	42,349	0,23
		Pace	48,46	62,092	0,47
		Wilangan	50,64	27,656	0,43
		Bagor	51,15	55,313	0,38
		Loceret	68,69	67,400	0,27
2	SWP II	Kertosono *	22,68	53,759	54,548
		Baron	36,80	48,350	48,606
3	SWP III	Tanjunganom *	70,84	109,873	110,896
		Ngronggot	52,99	72,732	72,923
		Prambon	41,16	68,843	68,834
4	SWP IV	Berbek *	48,30	54,307	54,094
		Sawahan	115,89	35,909	37,069
		Ngetos	60,21	34,346	35,393
5	SWP V	Rejoso *	151,66	68,248	68,516
		Gondang	95,04	51,993	52,105
		Ngluyu	86,15	14,339	14,328
6	SWP VI	Lengkong *	87,17	32,478	32,476
		Patianrowo	35,59	42,834	43,269
		Jatikalén	42,03	19,758	19,816
Jumlah			1.027,371	1.036,598	100

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk

* : Pusat SWP

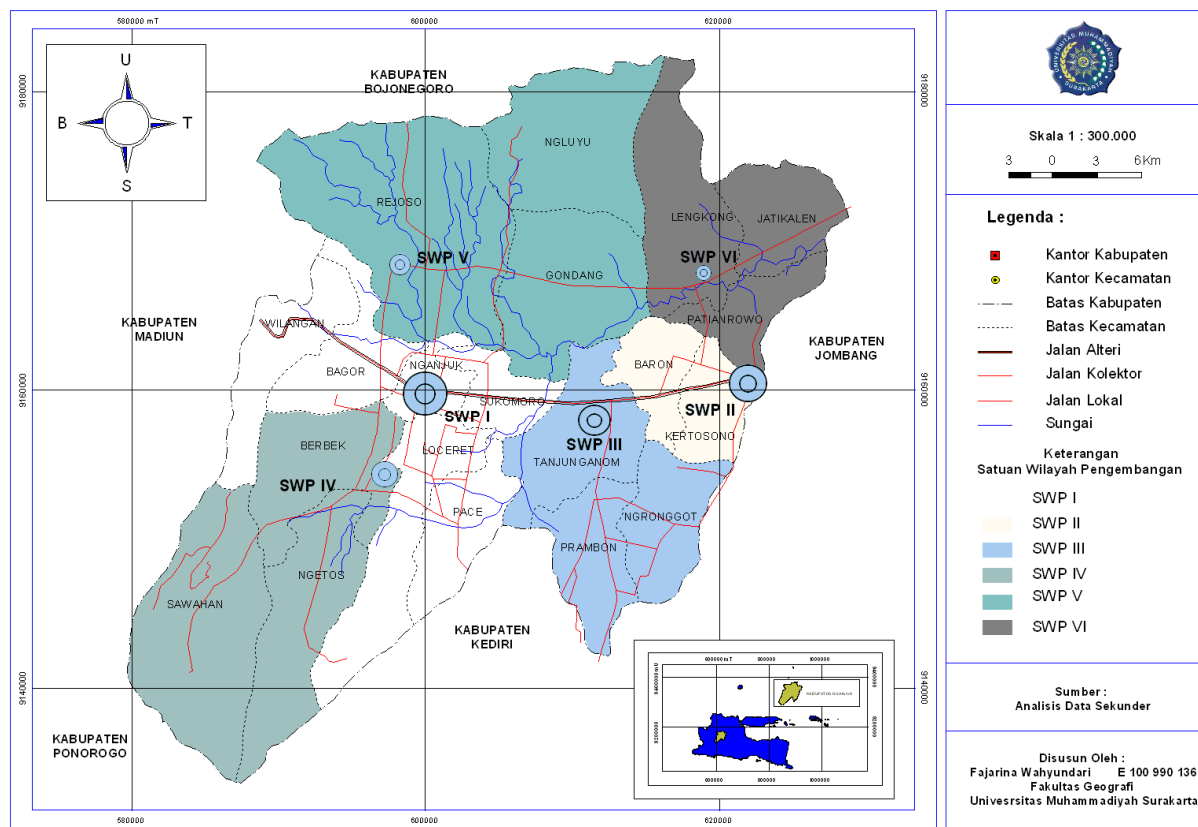
Tabel 1.2. Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi Penduduk di Kabupaten Nganjuk
Tahun 2005

No	Kecamatan	Fasilitas Sosial	Fasilitas Ekonomi
1	Sawahan	258	65
2	Ngetos	245	59
3	Berbek *	296	75
4	Laceret	299	107
5	Pace	390	138
6	Tanjunganom *	690	189
7	Prambon	483	426
8	Ngronggot	419	171
9	Kertosono *	455	170
10	Patianrowo	254	100
11	Baron	263	171
12	Gondang	272	140
13	Sukomoro	240	143
14	Nganjuk *	479	531
15	Bagor	306	143
16	Wilangan	156	124
17	Rejoso *	287	128
18	Ngluyu	88	43
19	Lengkong *	144	112
20	Jatikalen	149	64
Jumlah		6173	3045

Sumber : Perhitungan dari kecamatan – kecamatan dalam angka dan Kabupaten Nganjuk Dalam Angka

Dilihat dari tabel 1.1 dan 1.2 bahwa adanya perbedaan antara Kecamatan Nganjuk sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten dengan Kecamatan-kecamatan yang lain, terlihat pada jumlah fasilitas sosial ekonomi Kecamatan Nganjuk mempunyai jumlah yang paling banyak.

1. Fasilitas sosial meliputi :
 - a. Pendidikan, meliputi : TK, SD, SLTP, SLTA
 - b. Kesehatan, meliputi: RSUD, BKIA, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotik.
 - c. Ibadah meliputi; Masjid, Mushola, Gereja, Klenteng.
 - d. Jasa meliputi; Kantor Pos, Kantor Telepon, Wartel.
2. Fasilitas ekonomi meliputi :
 - a. Keuangan, meliputi : Bank dan Koperasi
 - b. Perdagangan, meliputi : Pasar, Toko, Warung



Gamabr 1.1 Peta Sub Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Nganjuk

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduk pada kecamatan yang menjadi pusat SWP dengan wilayah sub SWP di Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah terdapat perbedaan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduk antar SWP di Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah faktor yang menyebabkan perbedaan ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi di daerah penelitian?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perbedaan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduk pada kecamatan yang menjadi pusat SWP dengan wilayah sub SWP di Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui perbedaan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduk antar SWP di Kabupaten Nganjuk.
3. Mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Nganjuk.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai syarat menempuh ujian tingkat sarjana (S1) pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Memberi kontribusi pemikiran dalam menentukan prioritas pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan pengembangannya di Kabupaten Nganjuk.
3. Sebagai salah satu sumber bagi peneliti selanjutnya.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

Geografi memandang bumi sebagai habitat manusia yaitu tempat tinggal manusia. Habitat yang terdiri dari bingkai alami (*physical setting*) dan bingkai

insani (*human setting atau culture setting*) (Daldjoeni IV, 1982). Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa geografi tidak hanya memandang dan mempelajari aspek bumi saja melainkan mempelajari aspek manusianya baik yang bercorak politik, ekonomi, sosial maupun culture religius.

Fenomena manusia tersebut ditelaah dengan latar belakang lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sedangkan fenomena yang tidak terlepas dari wilayah *setting* atau wadah adalah keberadaan manusia dengan segala aktivitas hidup dengan penyediaan fasilitas sosial ekonomi.

Salah satu bagian pembangunan wilayah adalah pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonomi terutama bagi penduduk di daerah pedesaan. Pembangunan fasilitas tersebut dimaksudkan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pelayanan penduduk pedesaan untuk persatuan desa dan kota sebagai bentuk sistem pusat dengan daerah belakangnya (*hinterland*) secara efisien sesuai dengan fungsi serta mobilitas penduduk untuk memperoleh fasilitas jasa dan kesempatan sosial ekonomi (Budhy Tjahyati, 1982).

Fasilitas pelayanan bisa ditinjau atas dasar pendirinya, maka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, pelayanan yang merupakan fungsi kebijakan pemerintah (*Policy Function*). Kelompok ini dapat dicontohkan dengan pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Posyandu, Apotik), pelayanan pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA) dan sebagainya. Kedua, pelayanan yang berasal dari non pemerintah (*Non Policy Function*). Kategori kedua ini dapat ditunjukkan dengan adanya pertokoan, pelayanan reparasi, peribadatan, dan sebagainya (Conyers, 1982).

Sedangkan prasarana oleh Jayadinata (1986) diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Prasarana menurut bentuk, macam dan fungsinya
 - a. Bentuk prasarana
 - i. Yang berbentuk ruang atau bangunan (*space*)
 - ii. Yang berbentuk jaringan (*Net Work*)
 - b. Macam prasarana
 - i. Prasarana yang berbentuk ruang, meliputi :

- Perlindungan yaitu rumah
 - Kehidupan ekonomi, misalnya : bank, toko, pasar, pabrik, sawah dan sebagainya.
 - Kebudayaan, misalnya : bangunan pemerintah, sekolah, museum, lapangan olah raga dan sebagainya.
- ii. Prasarana yang berbentuk bangunan, meliputi :
- Sistem pengangkutan, misalnya : jaringan jalan, jaringan sungai dan sebagainya.
 - Utilitas umum (*public utility*) misalnya : jaringan pipa air minum, jaringan kawat listrik dan sebagainya.
 - Sistem pelayanan dalam kehidupan sosial ekonomi misalnya : irigasi dan sebagainya.
- c. Prasarana menurut fungsi, meliputi :
- i. Prasarana sosial (yang berbentuk jaringan atau ruang) terdapat dalam kegiatan kekeluargaan, pemerintahan, agama, kesehatan, pendidikan, rekreasi, jaminan/bantuan sosial, keamanan dan pertahanan, perhubungan dan komunikasi, serta informasi dan data.
- ii. Prasarana ekonomi (yang berbentuk jaringan atau ruang) terdapat dalam kegiatan pertanian / perkebunan / kehutanan, peternakan / perikanan, industri, konstruksi, bangunan, pariwisata dan perhotelan, perdagangan dan perusahaan jasa lain, perhubungan dan komunikasi serta informasi dan data.
2. Pembiayaan dan pembuatan serta pemeliharaan prasarana
- a. Pembiayaan, pertumbuhan dan pemeliharaan prasarana, meliputi :
- Masyarakat
- i. Badan hukum
 - ii. Pemerintah
- b. Cara pembuatan prasarana
- Evaluasi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan peserta pusat-pusat pelayanannya merupakan bagian dari analisis regional, khususnya menyangkut

masalah-masalah yang berhubungan dengan centralitas regional (Regional Centrality or Nodality) dari beberapa aktifitas dan sumber daya. Dalam suatu usaha pembangunan daerah/kawasan yang akan di bangun harus dipandang sebagai suatu system. System merupakan satu keseluruhan yang kompleks atau dapat dianggap sebagai satu himpunan dari bagian-bagian yang terkait satu sama lain atau sering juga dikatakan sebagai kelompok objek berkaitan yang membentuk suatu ikatan kesatuan (Bintarto dan Surastopo, 1979).

Tujuan kebijaksanaan social ekonomi adalah pengembangan wilayah dapat menurunkan pengangguran, menaikkan pendapatan dan memperbaiki pelayanan dalam suatu wilayah. Untuk mencapai hal tersebut diatas banyak hal yang dapat dilaksanakan, salah satu diantaranya adalah pembangunan prasarana yang merupakan alat untuk memperbaiki perkembangan suatu wilayah. Pembentukan prasarana ini sangat penting dalam memajukan wilayah yang terbelakang (Jayadinata, 1987).

Huisman (1987) bahwa penyediaan pelayanan secara efisien dan efektif penting dalam pembangunan karena dalam perencanaan fisik memberikan kerangka keruangan bagi kegiatan social dan ekonomi. Dengan demikian pelayanan social ekonomi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang bertumpuk pada kegiatan social dan ekonomi.

Adapun metode yang digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan dan fungsi pelayanan (Daya Layan) adalah sebagai berikut:

1. Besarnya ketersediaan fasilitas pelayanan di nilai melalui jumlah pelayanan yang ada disetiap daerah menggunakan metode scalogram.
2. Fungsi pelayanan (daya layan) merupakan perbandingan antara ketersediaan fasilitas pelayanan dengan berbagai standar minimum yang mempertimbangkan threshold (nilai ambang) untuk setiap pelayanan.

Informasi-informasi lain yang diperlukan pada penilai fungsi pelayanan antara lain mencakup rasio pelayanan terhadap standart rasio pengguna actual, rasio terhadap pengguna potensial dan rasio terhadap penduduk.

Pembangunan keruangan biasanya dicirikan dengan adanya pengorganisasian tata ruang (*spatial organization*) dari kegiatan ekonomi dan sosial yang membawa tekanan-tekanan tak terelakkan terhadap kebijakan regional, tergantung dari tingkatan atau tahapan pembangunan dan pengorganisasian tata ruang yang bersangkutan. Pentingnya kebijaksanaan regional dan jenis-jenis permasalahan yang harus dihadapi akan berubah (Fisher.H.B, 1975).

Suatu wilayah tidak hanya merupakan suatu sistem fungsional yang berbeda satu sama lain tetapi juga merupakan jaringan sosial, ekonomi maupun interaksi fisik. Sistem jaringan ini terbentuk oleh adanya pergerakan timbal balik yang merupakan kontak antar wilayah (*interaction*) dimana titik pandangnya diletakkan pada ketergantungan antar wilayah.

Didalam hubungan antar wilayah terdapat pula hubungan tertentu, meliputi :

1. Hubungan antara *central place* dengan *hinterlandnya*.
2. Hubungan antar pusat-pusat dalam suatu wilayah (interaksi internal)
3. Hubungan antara pusat-pusat didalam wilayah dengan wilayah luar (interaksi eksternal) (Rondinelli, 1985).

Salah satu pola hubungan diatas adalah hubungan *central place* dengan *hinterlandnya*. Ada empat konsep *central place* yang merupakan gabungan dan ide Christaller, Losch dan Galpin (ESCAP, 1979), yaitu :

1. Adanya keseragaman bentang lahan fisik dan sosial ekonomi
2. Tidak dibatasi suatu unit area
3. Kesamaan aksesibilitas terhadap tempat-tempat sentral dalam semua arah
4. Perilaku rasional dari konsumen

Tiga syarat utama bagi terjadinya interaksi keruangan, menurut Ullman adalah sebagai berikut :

1. Saling melengkapi (komplementari) ini terjadi apabila ada perbedaan sumber daya alam dan budaya antar daerah yang satu dengan yang lain, sehingga diantara kedua daerah tersebut terjadi interaksi suplay dan penawaran dan produksi tertentu.

2. Tidak dijumpai hambatan yang menghalangi (*Intervening opportunity*), peluang/kesempatan yang memberikan penawaran yang lebih baik karena adanya keuntungan faktor jarak antar wilayah yang berinteraksi. Apabila saling melengkapi telah terjadi maka akan terbentuk rute untuk melayani kebutuhan pertukaran antar wilayah. Saling melengkapi dapat terpotong oleh wilayah lainnya apabila terdapat wilayah ketiga yang menawarkan jenis barang yang sama dari lokasi yang lebih dekat jaraknya.
3. Transferability atau faktor jarak dimana interaksi akan terjadi apabila wilayah penawaran tidak terlampaui jauh. Apabila jarak antar wilayah terlalu jauh maka akan terjadi substitusi barang (Ullman, 1978).

Pada dasarnya pusat wilayah mempunyai hirarkhi. Hirarkhi dari suatu pusat ditentukan oleh beberapa faktor (Budiharsono, 2001) :

1. Jumlah penduduk yang bermukim pada pusat tersebut;
2. Jumlah fasilitas pelayanan umum yang ada dan;
3. Jumlah jenis fasilitas pelayanan umum yang tersedia.

Sedangkan Christaller dan Losch serta para pendukungnya, pembahasan suatu hirarkhi pusat wilayah pelayanan umumnya berpijak pada teori dasar *central place of theory*. Dua konsep untuk menerangkan teori lokasi pusat tersebut menurut Cristaller yaitu :

1. Jarak jangkauan barang (*The Range of Good*) yaitu jarak tempuh yang dapat ditolerir untuk suatu jenis barang atau pelayanan tertentu. Disamping unsur jarak, penentuan pilihan seseorang juga dipengaruhi oleh jenis, kualitas dan harga barang atau pelayanan yang ditawarkan.
2. Nilai ambang (*Threshold Value*) yaitu jumlah penduduk atau sumber daya minimum yang dibutuhkan untuk dapat mendukung penyediaan barang atau pelayanan tertentu.

Hirarkhi pusat pelayanan pedesaan sering kali dianggap sebagai hirarkhi bertingkat tiga yaitu : pelayanan pedesaan (*village service center*), kota distrik (*district town*) yang bersama-sama dengan berbagai pembaku (standar) dalam pelayanan sosial ekonomi merupakan titik tolak dari perencanaan pengembangan wilayah. Perencanaan pelayanan dan pusat pelayanan sosial ekonomi harus

mengacu pada tujuan, manfaat yang diharapkan dan potensi wilayah. Setiap wilayah akan mempunyai sebuah pusat pengembangan. Hendra Eswara (1980) mengemukakan lebih lanjut bahwa pembagian wilayah dalam pembangunan mempergunakan beberapa prinsip pokok. Pertama, wilayah tersebut tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kedua, wilayah tersebut sedapat mungkin tidak memotong wilayah administratif tingkat II. Ketiga, azas heterogenitas dipergunakan dalam menentukan wilayah pembangunan tersebut.

1.3. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Evita Rahma wati 2001	Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi dan Hirarkhinya di Kabupaten Dati II Sragen	Mengetahui potensi fisik dan sosial ekonomi wilayah di Kabupaten Sragen. Mengetahui kondisi daya layan dan kebutuhan fasilitas dan pengembangan hirarkhi pusat pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Dati II Sragen.	Teknik analisa data sekunder dengan pendekatan kualitatif model tempat sentral dengan modifikasi jumlah dan kepadatan penduduk serta jenis fasilitas sosial ekonomi.	Arahan penentuan pusat-pusat pelayanan ekonomi berdasarkan pada potensi fisik wilayah, kondisi daya layan dan kebutuhan fasilitas pelayanansosial ekonomi serta kepadatan penduduk.
2	Risyant o, 1993	Evaluasi Fasilitas Sosial Ekonomi dalam kaitannya dengan penentuan fungsi sosial ekonomi kecamatan yang menjadi pusat pembangunan di Kabupaten Bantul.	Mengetahui perbedaan yang nyata tingkat fasilitas pusat kawasan pelayanan dengan kecamatan lainnya. Mengetahui kondisi fasilitas sosial ekonomi pada tiap-tiap kecamatan. Mengetahui kondisi fasilitas sosial ekonomi penduduk.	Metode observasi atau surve lapangan. Wawancara dengan instansi setempat Data dari pemerintah.	Dalam penelitian di Bantul menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat fasilitas pusat kawasan pelayanan dengan kecamatan lainnya.
3	Fajarina Wahyan dari 2008	Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi Penduduk dan Hirarkhinya di Kabupaten Nganjuk	a. Untuk mengetahui perbedaan kondisi ketersediaan fasilitas pelayanan social ekonomi antara kecamatan yang menjadi pusat SWP dan kecamatan yang menjadi sub SWP. b. Untuk mengetahui perbedaan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi antar SWP di kabaupaten Nganjuk. c. Untuk mengetahui fakto-faktor yang mempengaruhi ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi.	Metode surve Analisa data sekunder,data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan analisa product moment dan uji t serta scoring.	1. dalam hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan ketersediaan failitas pelayanan social ekonomi antara kecamatan yang menjadi pusat SWP dan sub SWP di Kabupaten Nganjuk. 2. terdapat perbedaan ketersediaan fasilitas social ekonomi antar SWP di Kabupaten Nganjuk 3. terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ketersediaan fasilitas pelayanan social ekonomi di Kabupaten Nganjuk.

1.6. Kerangka Penelitian

Suatu wilayah bukan hanya merupakan system yang berbeda antara satu dan lainnya tetapi juga merupakan jaringan sosial ekonomi maupun interaksi fiskal. Dimana system ini dibentuk oleh adanya pergerakan timbal balik yang merupakan hasil dari kontak masyarakat pada suatu wilayah dengan wilayah yang lain.

Usaha pembangunan harus diarahkan kembali pada pembangunan keruangan yang terintegrasi. Tujuannya adalah memajukan sistem pusat-pusat pelayanan yang meningkatkan berbagai aktifitas masyarakat dibidang sosial ekonomi. Dengan demikian diharapkan mampu memenuhi segala kebutuhan pelayanan sosial ekonomi yang dibutuhkan oleh penduduk.

Fasilitas pelayanan dapat berperan sesuai dengan fungsinya apabila dilaksanakan pada lokasi yang menguntungkan bagi penduduk, berarti unsur lokasi memegang peranan penting dalam pembangunan fasilitas pelayanan.

Evaluasi ketersediaan fasilitas sosial ekonomi diharapkan mampu menunjukkan kondisi fasilitas sosial ekonomi dan hirarkhinya, baik pada kecamatan yang menjadi pusat satuan wilayah (SWP) dan wilayah Sub SWP.

Adapun pengukuran fasilitas pelayanan sosial ekonomi diklasifikasikan kedalam tiga kategori, yaitu :

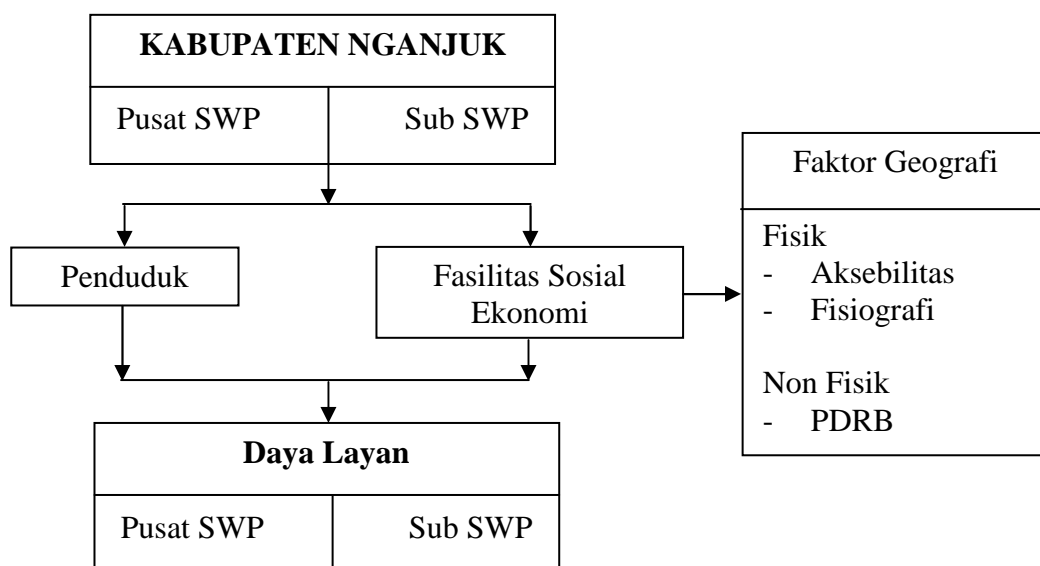
- a. Ketersediaan (*availability*) adalah mengukur ada tidaknya suatu fasilitas pelayanan.
- b. Besarnya ketersediaan (*size of tavailabiliy*) adalah mengukur jumlah unit suatu fasilitas pelayanan.
- c. Fungsi ketersediaan (*function of availability*)

Penyebaran penduduk yang belum merata dan pertambahannya disetiap tahun, menyebabkan bertambah pula jumlah fasilitas sosial ekonomi yang dibutuhkan oleh penduduk pada suatu wilayah.

Jumlah fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang berbeda disetiap kecamatan akan menyebabkan terjadinya ranking atau tingkatan jumlah dari fasilitas sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian akan dapat dinilai tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi antar SWP di Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini di maksudkan mengukur besarnya fasilitas sosial ekonomi penduduk menggunakan pembobotan (scoring) dan klasifikasi. Evaluasi ketersediaan fasilitas social ekonomi ini diharapkan mampu menunjukkan kondisi fasilitas social ekonomi baik pada kecamatan yang menjadi pusat SWP atau wilayah sub SWP.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mrngukur besarnya fasilitas sosial ekonomi pnduduk dengan menggunakan pembobotan, scoring, dan klasifikasi. Evaluasi ketersediaan fasilitas sosial ekonomi diharapkan mampumenunjukkan kondisi fasilitas sosial ekonomi dan hirarkhinya baik pada kecamatan yang menjadi kawasan SWP ataupun Sub SWP.



Gambar 1.1 : Diagram Alir Penelitian

Sumber : Penulis, 2005

1.7. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan sementara tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini akan didapatkan hipotesis :

1. Terdapat perbedaan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduk pada kecamatan yang menjadi pusat SWP dengan wilayah sub SWP di kabupaten Nganjuk.

2. Terdapat perbedaan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduk antar SWP di kabupaten Nganjuk.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi.
 - a. Pada daerah dengan fisiografi berbukit sampai bergunung ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi kurang, sedangkan pada daerah datar ketersediaan fasilitas sosial ekonominya banyak.
 - b. Pada wilayah dengan aksesibilitas yang baik maka ketersediaan fasilitas sosial ekonomi juga baik (banyak).

1.8. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisa data sekunder, dimana semua kecamatan di daerah penelitian dijadikan unit analisis data sekunder, yang diperlukan antara lain adalah :

- a. Letak, luas dan batas wilayah
- b. Kondisi fisik daerah
- c. Kondisi sosial ekonomi

Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Pemilihan daerah penelitian

Penelitian ini dilakukan di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Adapun pertimbangan tersebut bahwa jumlah distribusi ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dimasing-masing kecamatan tidak sama jumlahnya dan juga potensi yang dimiliki berbeda.

2. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, dimana data-data tersebut diperoleh dari instansi terkait. Adapun jenis data yang diperoleh adalah

- a. BPS Kabupaten Nganjuk, data yang diperoleh meliputi :
 - Data kependudukan
 - Data fasilitas sosial ekonomi

- Kabupaten Dalam Angka
- b. BAPPEDA Kabupaten Nganjuk, data yang diperoleh adalah :
 - Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
- c. Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pekerjaan Umum, data yang diperoleh adalah :
 - Peta jaringan jalan
 - Peta administrasi
 - Data infrastruktur

3. Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa statistik, yang meliputi : analisa korelasi, uji t, dan scalogram.

a. Analisa Korelasi

Uji statistik yang digunakan adalah analisa korelasi product moment dari Pearson. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel uji yang diterapkan untuk menguji hipotesis pertama apakah ada hubungan antara kepadatan penduduk dengan jumlah distribusi ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi.

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n\sum x^2 - (\sum x)^2 / n\sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Dimana :

r = Koefisien Korelasi

x = Variabel Bebas

y = Variabel Tak Bebas

N = Jumlah Subyek yang Diteliti

Nilai r terletak antara -1 dan +1 ($-1 < r < +1$) (Sutrisno Hadi, 1988)

b. Uji t

Yang dimaksud uji t (dua pihak) untuk membandingkan antara dua keadaan atau dua populasi (Sudjana, 1989). Uji ini digunakan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan kondisi fasilitas pelayanan sosial ekonomi antara kecamatan yang menjadi pusat SWP dan Sub SWP (hipotesis kedua)

$$t = \frac{x_1 - x_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Dimana :

- t = Harga Kritis t
- x_1 = Rata-rata Skor Kecamatan Pusat SWP
- x_2 = Rata-rata Skor Kecamatan Sub SWP
- s = Standar Deviasi
- n_1 = Jumlah Kecamatan Pusat SWP
- n_2 = Jumlah Kecamatan Sub SWP

Untuk menghitung skor yaitu dengan cara menjumlahkan masing-masing jumlah unit fasilitas pelayanan sosial ekonomi disetiap kecamatan. Hasil dari skor masing-masing jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi kemudian dijumlah total. Berdasarkan total skor nantinya digunakan untuk menentukan kondisi fasilitas sosial ekonomi pada tiap unit kawasan SWP.

c. Scalogram

Digunakan untuk mengidentifikasi dan membandingkan jenjang wilayah atas dasar pelayanan yang ada pada daerah tersebut. Tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengurutkan wilayah menurut besarnya jumlah penduduk pada kolom scalogram.
2. Inventarisasi jenis-jenis pelayanan pada jenis scalogram.
3. Isikan jumlah unit-unit pelayanan pada sel-sel tabel scalogram sesuai dengan nama wilayah dan jenis pelayanannya.

Perubahan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dengan sendirinya selalu disesuaikan dengan jumlah penduduk menurut kebutuhan yang ada. Hubungan antara keduanya kemudian melahirkan standar fasilitas pelayanan sebagai berikut:

Tabel 1.4. Standart Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi

No	Jenis Fasilitas Pelayanan	Jumlah Penduduk
1	Pendidikan	
	a. TK	1.000
	b. SD	1.600
	c. SLTP	4.800
	d. SLTA	4.800
2	Kesehatan	
	a. RSU	240.000
	b. BKIA	10.000
	c. Puskesmas	30.000
	d. Puskesmas pembantu	15.000
e. Apotik	10.000	
3	Ibadah dan Jasa	
	a. Masjid atau Gereja	30.000
	b. Kantor pos	30.000
	c. Kantor telepon	30.000
	d. Warung telepon	250
e. Mushola/langgar	2500	
4	Perekonomian	
	a. Pasar	30.000
	b. Toko	2.500
	c. Warung	250
	d. Bank	
e. KUD	30.000	

Sumber : Sutanto dkk, dalam Ewitawati dengan modifikasi.

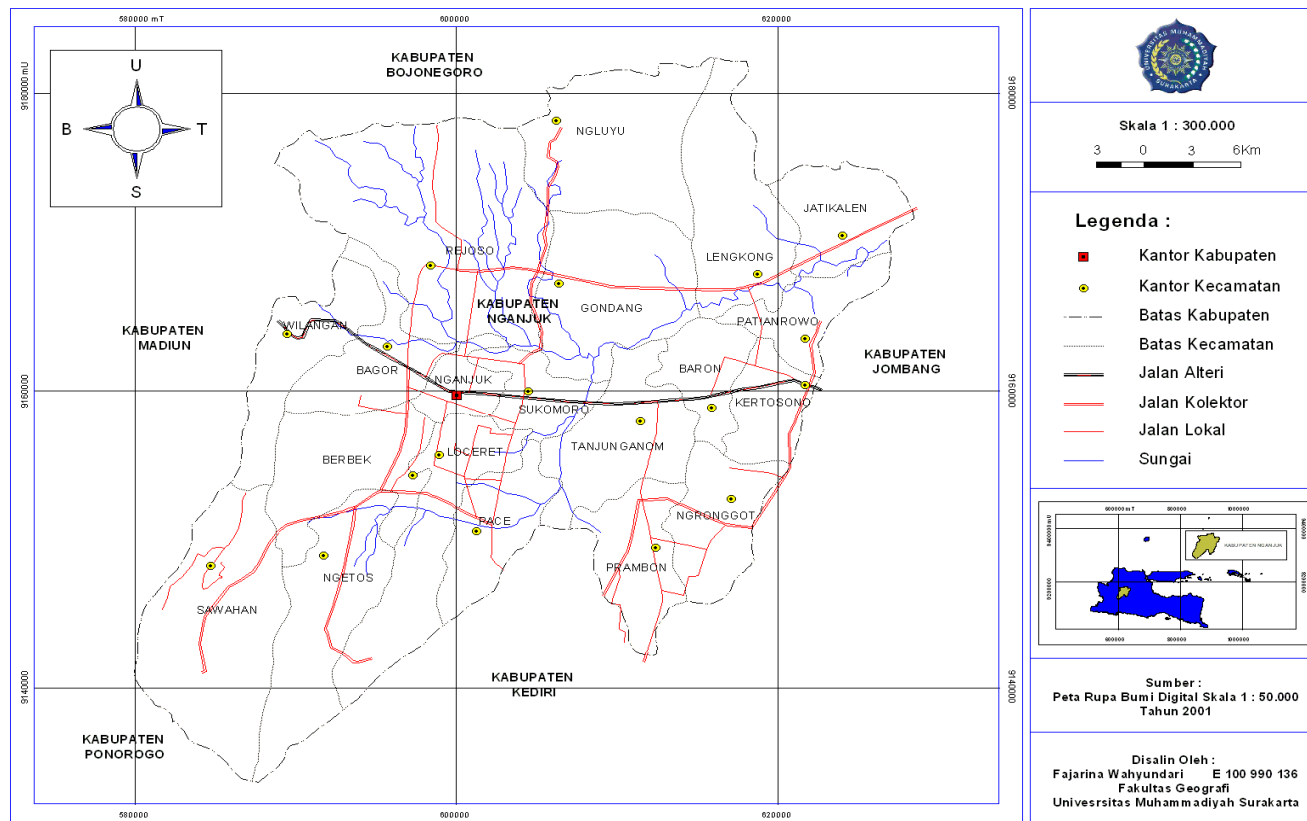
Penggunaan jumlah penduduk tertentu dalam indicator pada tabel 1.4. sudah dilandasi asumsi tertentu. Misalnya untuk jumlah penduduk dalam ukuran pendidikan sudah terkandung didalamnya struktur penduduk menurut umur. Sebuah sekolah TK bisa didirikan untuk jumlah penduduk 1000 orang, maka dikandung asumsi bahwa usia TK 8 %. Untuk 1 SD jumlah penduduk 1600 orang karena terhitung 15 %nya

adalah usia SD. Selanjutnya untuk setiap 3 SD membutuhkan 1 SLTP, oleh karena itu standart jumlah penduduknya adalah 3 x SD yaitu 4800 orang demikian juga untuk tingkat SLTA. (Risyanto,1993)

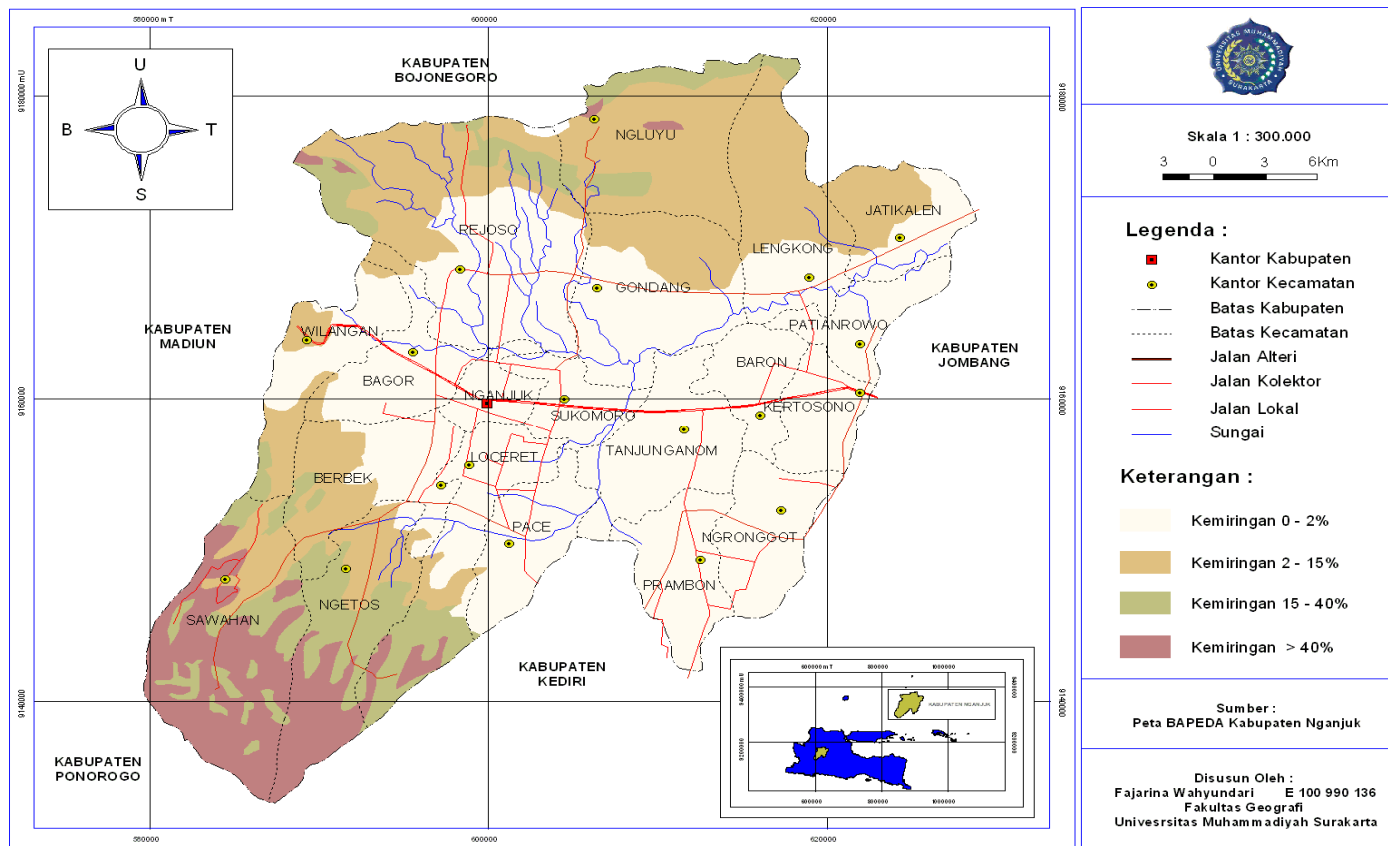
1.9. Batasan Operasional

1. **Evaluasi adalah** menilai fasilitas yang ada (riil) dengan standarisasi fasilitas sosial ekonomi berdasarkan pedoman dari Direktorat Jendral Tata Kota dan Daerah.(DPU 1983 dan Sutanto 1993)
2. **Fasilitas adalah** keseluruhan dari sarana dan prasarana. (Jayadinata,1986)
3. **Fasilitas sosial adalah** segala fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah atau non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau nyata menurut fungsi sosial pelayanan pada penggunaanya. Fasilitas sosial diantaranya : pendidikan, kesehatan, jasa dan pemerintahan, ibadah, lembaga sosial, rekreasi, keamanan dan pertahanan (Conyers 1991)
4. **Fasilitas ekonomi adalah** segala fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dan non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau nyata menurut fungsi ekonomi pelayanan pada para penggunaanya. Fasilitas ekonomi diantaranya : perdagangan, bank, industri, konstruksi, pariwisata, perhotelan (Conyers, 1991)
5. **Fasilitas pendukung (infrastruktur) adalah** segala fasilitas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau non pemerintah yang mempunyai pengaruh nyata baik menurut fungsi ekonomi bagi penggunaanya (Conyers,1991)
6. **Daerah layanan adalah** daerah dimana penduduknya mendapat layanan dari fasilitas pelayanan.
7. **Pusat pelayanan merupakan** suatu tempat tertentu yang terdapat didaerah pemukiman yang mempunyai sekurang-kurangnya dua jenis pelayanan berbeda tidak lebih dari 0,5 dan tidak dipisahkan oleh batas alam (sungai, lembah,dll) yang dapat menjadi hambatan. (Irfan Yahya,1986)
8. **Aksesibilitas yaitu** kemudahan untuk mencapai tujuan dari satu tempat ke tempat lain dilihat dari panjang jalan, lebar jalan, maupun luas wilayah.

9. **Wilayah merupakan** daerah dengan batas administrasi dan digunakan sebagai satuan perencanaan seperti wilayah propinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan dan desa.
10. **Kepadatan penduduk adalah** banyaknya penduduk per satuan unit wilayah (I.B.Mantra, 1985)
11. **Kondisi fasilitas adalah** perbandingan antara jumlah unit fasilitas sosial ekonomi dengan besarnya standart kelyakan bagi penduduk pedesaan. Berdasarkan pedoman Direktorat Tata Kota dan Daerah DPU (1983).
12. Hinterland adalah daerah yang menyediakan bahan-bahan dasar atau kebutuhan pokok untuk kota dan memberikan pengaruh pada kota dan pasar-pasar kota. (winardi, 1969)
13. **Pelayanan sosial ekonomi adalah** pelayanan yang penggolongannya berdasarkan pada dampak langsung yang ditimbulkan oleh pelayanan tersebut. Dalam penelitian ini pelayanan sosial meliputi : pelayanan pendidikan (TK, SD,,SLTP, SLTA), pelayanan jasa (kantor telepon, wartel, kantor pos), pelayanan kesehatan (RSU, BKIA, Puskesmas,Puskesmas Pembantu, Apotik), tempat ibadah. Sedangkan pelayanan ekonomi meliputi : pasar, toko, warung, bank, kud.



Gamabr 1.3 Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2005



Gamabr 1.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Nganjuk